Kasus Korupsi Vigit Waluyo,

Buron Kasus Korupsi PDAM Sidoarjo

Korupsi artinya tindakan yang rusak, menyogok, adalah tindakan pejabat publik, serta menyenangkan diri sendiri. tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri.Faktor penyebab korupsi itu ada 2 yaitu faktor internal dan factor ekstrenal. Faktor internal yaaitu yang berasal dari diri kita sendiri, sedangkan factor eksternal yaitu tentang faktor hukum, faktor ekonomi dan faktor organisasi.Undang-undang yang mengatur tentang korupsi, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.faktor yang mempengaruhi yaitu keinginan pribadi untuk menguasai harta masyarakat. • Contoh. Contoh tindakan korupsi yaitu : a) Mengambil sebagian uang kembalian belanja yang di perintah oleh ibu. b) Kepala keluarga tidak memberikan hak kewajibannya c) Perbuatan berkata bohong. • Contoh tindakan korupsi di lingkungan Sekolah,: a) Menitip absen temannya dan ternyata orang nya tidak hadir b) Menggunakan uang kas untuk kepentingan sendiri c) Makan di kantin dengan membayar tidak sesuai yang di makan • Contoh tindakan korupsi di lingkungan : a) Tidak mau mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar b) Melakukan pungli di masyarakat c) Serangan fajar maksudnya di saat pemilu berlangsung masyrakat di beri uang sebelum matahari terbit.

Teori – teori yang diperlukan dalam mendeskripsikan proses penelitian dapat dilihat dari dua cara pandang, di satu pihak, kelompok elite yang mmpunyai komitmen bagi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Di pihak lain, kelompok tersebut tidak melihat perlunya mengadakan suatu revolusi social yang akan mengubah secara total system pemerintthan yang ada. Kaum elite pergerakan ini lebih memandang perlu untuk meengserkan pemerintahan colonial asing dan menggantinya dengan elite lokal (2017 : 75). Demokrasi di ekonomi menghendaki good governance yang prinsip – prinsipnya adalah aksebilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun saat ini yang terjadi dalam negara Indonesia adalah ke tidak transparaanan dalam hal ekonomi, hal ini membuat kepercayaan masyarakat akan system pemerintahan semakin menurun. Korupsi yang semakin menyeruak menjadi sebuah suatu hal yang biasa dilakukan. Seakan – akan korupsi adalah suatu budaya yang tak akan pernah habisnya. Seperti halnya calon legislatif yang selalu menkampanyekan mengenai poltik yang bersih dan transparan namun dalam berjalannya waktu hal itu tidak dapat bisa dipastikan lagi. Yang tadinya menjanjikan suatu politik yang bersih tapi pada kenyataannya wakil rakyat tersebut melakukan korupsi. Teori-teori pendukung yang diperlukan dalam mendiskripsikan proses penelitian ini diantaranya adalah definisi korupsi dan tindakan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi korupsi itu tindakan yang buruk dan dilarang oleh negara, entah di negara manapun. Dan kasus korupsi itu patut di beri hukuman mati, Karena orang yang sudah melakukan tindakan korupsi seakan akan beliau semena mena bermain dengan uang masyarakat dan pantas di beri hukuman mati. Dan masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Jika Indonesia masih banyak pejabat pejabat yang korupsi negara Indonesia akan menjadi negara berkembang terus menerus dan tidak bisa menjadi negara maju.

Persoalan korupsi di Indonesia masih menjadi momok terbesar di bangsa ini. Di pemerintahan tingkat daerah maupun di tingkat pemerintahan pusat korupsi masih menjadi suatu budaya yang tak pernah berhenti.Korupsi merupakan suatu keinginan yang meniyimpang. Korupsi kerapkali menghantui para pemimpin dan jajajaran pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi melakukan tindakan korupsi didasari oleh keinginan manusia untuk menguasai dan memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan kejahatan tersebut didasari oleh kebebasan untuk bertindak. Dengan sifat manusia yang tidak memiliki moral, kebebasan untuk bertindak kejahatan akan muncul dari dalam diri manusia. Dan tindakan tersebut juga dapat mempengaruhi orang lain. Keinginan untuk korupsi itu sendiri sebenarnya didasari juga dengan adanya kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib dalam artian ada kesempatan yang memicu tindakan korupsi. Tindakan kejahatan tersebut didasari oleh kebebasan untuk bertindak. Dengan sifat manusia yang tidak memiliki moral, kebebasan untuk bertindak kejahatan akan muncul dari dalam diri manusia. Dan tindakan tersebut juga dapat mempengaruhi orang lain. Sehigga mengakibatkan terjadi nya tindakan korupsi yang sangat banyak di Indonesia ini, sering kali banyak yang sadar akan tindakan yang dilakukannya itu sebenarnya tidak baik dalam artian banyak merugikan banyak pihak tetapi karena sifat manusia yang sekarang memiliki keinginan yang tinggi sehingga memicu tindakan korupsi. Tindakan korupsi tadi bisa berasal dari tuntuntan gaya hidup sesorang, jadi jika semakin tinggi gaya hidup sesorang memicu tindakan – tindakan yang kurang baik atau merusak moral, seseorang itu akan melakukan segala cara akan dapat memenuhi kebutuhan mereka atau gaya hidup yang sedang mereka jalani hingga rela mengorbankan kepentingan orang lain demi mementingakan kepentingan mereka sendiri. Tindakan korupsi seperti itu sebenarnya adalah hal yang sangat harus ditindak lanjuti karena jika tidak segera ditindak lanjuti akan berakibat buruk untuk perkembangan moral di Indonesia ini sehingga nantinya akan banyak yang melakukan tindakan yang lebih buruk dari tindakan korupsi karena kurangnya penangannan dari masyarakatnya. Seperti kasus Vigit Waluyo korupsi PDAM senilai Rp 3

miliar pada tahun 2010, Vigit Waluyo akhirnya menyerahkan diri kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sangat disayangkan sebenarnya jika seorang contoh masyarakat melakukan hal tersebut karena mereka menjadi contoh untuk anggota dan orang lain, jika semua memimpin di Indonesia seperti itu lalu bgaiman nasib bangsa ini? Bagaimana perkembangan yang terjadi di masa depan nantiya? Keadaan yang sudah sangat sering dilakukan ini membuat banyak pemimpin menganggap ini hal biasa malah bisa menjadi budaya, agar tidak terdapat kecurangan dalam tindakan korupsi maka pengaman yang dilakukan harus ketat, sehingga tidak ada yang berani dan mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan yang merusak moral seperti itu. Mantan Manajer tim Deltras Sidoarjo itu sempat menjadi buron sejak dikeluarkan surat DPO oleh Kejari Sidoarjo pada bulan Juni 2018 lalu. Pada hari Jumat yang bersangkutan menyerahkan diri dan langsung kami lakukan penahanan di lapas.” Kata kepala Kejari Sidoarjo Budi Handaka kepada wartawan”. Seorang pemimpin seharusnya jujur dan dapat dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya adalah modal dasar seorang pemimpin yaitu mampu bertanggung jawab, Mampu mendelegasikan tugas, Memiliki sikap positif, Keberanian sosial dan percaya diri dan mempunyai moral yang baik. Menjadi seorang pemimpin seharusnya mikir apa yang dilakukan itu baik atau tidak, Karena seorang pemimpin harus mengayomi masyarakatnya dan memberi contoh yang baik. lebih baik seorang koruptor di beri hukuman yang setimpal. Jika dengan hanya dalam waktu yang cukup singkat dan di penjara yang cukup singkat, itu sama saja menyenangkan koruptor. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, hukuman bagi para koruptor adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Namun pada kenyataannya mereka para koruptor kebanyakan dihukum di bawah 5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Dan korupsi di negara kita Indonesia ini tidak ada habisnya . Persoalan korupsi masih menjadi permasalahan di pemerintahan Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.